STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM

Abdul Rokhim

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Korespondensi: abdul.rokh@yahoo.com

Abstrak

Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat ditandai dengan meluasnya pergaulan bebas yang berakibat semakin banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar perkawinan. Berkaitan dengan itu maka isu utama yang hendak dibahas di sini adalah konsep anak temuan (anak *laqith*) menurut perspektif hukum Islam serta implikasinya dalam hal *nasab* dan perwalian. Menurut hukum Islam anak temuan dapat di-*nasab*-kan kepada orang yang menemukan dengan jalan pengakuan sehingga anak temuan tersebut telah menjadi anak sah sebagaimana anaknya sendiri. Khusus terhadap anak temuan perempuan, perwaliannya tetap berada pada orang yang telah menemukan dan mengakuinya dan jika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka yang menjadi walinya adalah orang yang telah menemukan dan mengakuinya.

Kata-kata Kunci: Anak Temuan; Pengangkatan; Perwalian; Hukum Islam.

Abstract

Moral deterioration in society is characterized by widespread promiscuity resulting in the increasing number of babies born out of wedlock. In this regards, the main issue to be discussed here is the concept of foundlings (*laqith* in Islamic law) viewed from the perspective of Islamic law and its implications in terms of *nasab* and guardianship. According to Islamic law, foundlings can be brought a family relationship could be established between a foundling and the person who found the child and recognized that the foundling has become a legitimate child of his own. In a particular case where the foundling is a girl, the guardianship remains in people who have found her and acknowledged her as if she was his own child. When the child is about to enter into marriage, the person who found and acknowledged her would be legitimately her marriage guardian.

Key Words: Foundlings; Adoption; Guardianship; Islamic Law.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat ditandai dengan meluasnya pergaulan bebas yang berakibat semakin banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar perkawinan. Hampir setiap hari, media massa baik cetak maupun elektronika memberitakan tentang adanya bayi yang baru lahir dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja di rumah sakit di mana mereka dilahirkan. Bahkan sering ditemukan bayi yang baru lahir dibuang di tempat sampah. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat, namun tidak sedikit pula yang selamat/masih hidup.

Bayi-bayi yang selamat biasanya ditiptkan di rumah sakit atau di panti asuhan dan banyak juga bayi-bayi tersebut dirawat oleh pasangan yang tidak mempunyai anak, atau dipelihara oleh orang-orang yang bersimpati dengan nasib mereka. Di antara yang merawat ada yang bermaksud menjadikan bayi-bayi tersebut sebagai anak.

Melihat kenyataan tersebut timbul pertanyaan: Bagaimana status bayi tersebut? Sementara orang tua kandung anak tersebut tidak diketahui, serta tidak dapat dilacak keberadaannya, seperti kasus bayi-bayi yang dibuang di pinggir jalan atau di tempat sampah atau ditinggal begitu saja oleh orang tuanya. Bertitik tolak dari permasalahan

di atas maka penulis mencoba untuk membahas mengenai *nasab* dan perwalian anak *laqith* (anak temuan) menurut hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Anak *Laqith*

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa).”¹ Anak dalam pengertian bahasa sangat banyak yaitu keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang ter-masuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.²

Dalam kamus bahasa Arab, anak disebut juga dengan istilah *walad*, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang *shaleh*. Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam penafsiran kata-kata *walad* pada ayat 176 surat an-Nisa’ yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pandangan ini sangat berbeda dengan *ijma* para *fuqaha* dan ulama yang dianut selama ini bahwa yang

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1998) 31.

² Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1997) 4.

dimaksud dengan *walad* dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian *walad* dalam *nash* dapat berarti laki-laki dan juga dapat berarti perempuan.³

Kata *al-Walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan *kataab* tidak berarti mesti ayah kandung.⁴ Menurut Hamka, anak ialah aliran dari air dan darah sendiri.⁵

Menurut bahasa Arab, *laqith* disebut juga *al-manbuz*, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sa'di Abu Jaid menambahkan bahwa *laqith* adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya. Dalam memberikan pengertian tentang anak pungut, pertama-tama penulis akan melihatnya dari segi etimologi. Dalam bahasa Arab berasal dari *laqatha* yang berarti mengambil anak pungut.⁷

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*, yaitu:

- a. Menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah, "*Laqith* ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh

keluarganya karena takut kemiskinan atau tuduhan zina."

- b. Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatu ath thalibin* mendefinisikan anak temuan (*laqith*) dengan, "anak-anak kecil (belum *baligh* berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat)."
- c. Malikiyah mendefinisikan anak *laqith*: "seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya."
- d. Hanafiyah mendefinisikan: "*laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa *mummayiz*."

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang karena dua hal. Pertama, karena tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, Kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.

Berdasarkan definisi di atas, tampaknya *fuqaha* sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar 1990) 95.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid XV: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera Hati 2004) 614.

⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI-XXII* (Pustaka Panji Mas 1988) 195.

⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Pustaka Firdaus 2002) 143.

keluarganya adalah termasuk dalam kategori *laqith* sedangkan al-Hanabiyah dan al-Syafi'iyah menambahkan batasan umur, yaitu saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.

Rukun *laqith* ada tiga, yaitu:

التقاط	Mengambil anak yatim yang dibuang;
لقيط	Anak yang dibuang;
مقاط	Orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut.

Imam Nawawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya, yaitu: (1) Orang tersebut harus sudah cakap hukum (*taklif*); (2) Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari tuan-nya; (3) Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuh-nya; (4) Adil.

Memelihara kehidupannya, berarti menghilangkan kesulitan semua orang, sama saja memberi kesejahteraan kepada mereka. Selain, anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada orang yang sangat membutuhkan makanan, kita wajib mem-bantunya, maka mengambil *laqith* lebih utama. Oleh karena itu, para ulama mewajibkan bagi yang menemukannya, untuk meng-ambil jika tidak ada lagi orang selain dia.

Anak temuan ini sering diistilahkan dengan anak pungut. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak pungut yaitu anak orang lain yang

diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam hal ini juga disebut sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dilakukan untuk memperoleh warisan atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibatnya, anak yang dipungut kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dalam segala hal dan kewajibannya.

Menurut Hilman Hadi, anak pungut adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua yang memungut dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan untuk pemeliharaan atas harga kekayaan rumah tangga.

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak pungut adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Dalam versi lain dikemukakan pula bahwa memungut anak ialah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalan dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pemungutan anak di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan upacara keagamaan, diumumkan dan

disaksikan pejabat dan tokoh agama, agar jelas statusnya. Setelah selesai upacara, si anak menjadi anggota penuh dari kerabat yang mengangkatnya, dan terputus hak warisnya dari kerabatnya yang lama.⁸ Dari beberapa definisi di atas, pengertian yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut memberikan penekanan pada perlakuan sebagai anak dalam pengertian kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan sebagai anak kandung sendiri.

Anak Laqith Menurut Hukum Islam

Nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam *syari'at* Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak, karenanya ahli *fiqih* sebagai sarjana hukum yang bertugas sebagai artikulator terhadap teks-teks suci (*an-nushus al-muqadsah*) terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara aspek yang menjadi kajian dan mendapat perhatian khusus mereka masalah anak temuan, yang lebih dikenal dengan istilah *al-Laqitha* atau *Luqatha*. Fuqaha memberikan pengertian, dan mengatur hukumnya dari segala segi dalam suatu pembahasan khusus dan judul khusus, yaitu "*Bab al-Laqith*".

Para ahli *fiqih* menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut wajib (*wajib qifayah*) mengambalnya. Karena hal itu merupakan *ihyilinafs*. Dan diharapkan suatu saat dia akan bermanfaat dalam kehidupannya.

Fuqaha tidak berhenti sampai disini saja dalam memperhatikan kelanjutan hidup *Laqith* dari sarana-sarana untuk memperhatikan pendidikan dan nafkahnya. *Fuqaha* menetapkan jika *baitul mal* tidak ada untuk menutupi kebutuhan anak tersebut dan walinya tidak sanggup memberikan nafkah, maka dalam keadaan seperti ini masyarakat berkewajiban saling tolong menolong dalam memberikan nafkah kepadanya. Hal ini menjadi kebajikan umum dan dianjurkan oleh Al-Qur'an dalam rangka tolong menolong.

Sumber Hukum Anak Laqith

Menurut *Hadits*, orang yang menemukannya pertama ialah yang harus mengasuhnya, jika ia sebagai orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa. Ia berkewajiban mendidik dan mengajarkannya.⁹ Said bin Mansur dalam kitab *sunan*-nya meriwayatkan; bahwa Sinin bin Jamilah berkata: Aku pernah menemukan anak tersesat di jalan kemudian aku bawa kepada Umar bin Al Khaththab, ia lalu berkata "Kenalanku wahai *amirulmukminin*, sesungguhnya dia adalah orang yang saleh." Umar lalu berkata: "Apakah demikian dia?" Ia menjawab: "Ya." Umar lantas berkata lagi: "Pergilah bersama dia, dia merdeka, dan kau boleh menjadi wali dan mengasuhnya." Kemudian kami memberikan nafkahnya. Dan menurut suatu *lafaz*; kami berkewajiban menyusuinya.

⁸ *Ibid.* 144.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13 (PT. Al-Ma'arif 1987) 85.

Dalam *Fiqih*, menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *al-Laqith* (anak temuan) adalah anak kecil yang belum *baligh*, yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya merupakan *fardhu kifayah*, sama hukumnya memungut barang yang hilang lainnya. Seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam, maka hukumnya sebagai muslim. Orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada *Baitulmal* guna digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lain yang diperlukan anak temuan tersebut.¹⁰

Ahmad Husni mengatakan, sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak ini, termasuk juga pengakuan terhadap anak temuan. Hampir semua kitab *fiqih* tradisional maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak ini, khususnya kepada anak temuan yang disebut dengan *laqith*. Demikian juga undang-undang keluarga muslim di negara-negara Islam Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang islam untuk menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka ia berdosa dan dapat dikenakan denda sebagai perbuatan *jarimah*.

Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung-nya. Apabila pihak yang menemukan anak tersebut telah mengikrarkan pengakuannya maka sah lah anak tersebut sebagai anaknya sendiri, dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan orang yang mengakuinya meskipun pengakuan tersebut dilawan oleh orang lain dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Menurut Imam Malik, pengakuan tersebut tidak sampai menimbulkan *nasab* yang sah, kecuali yang menemukan anak tersebut mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jika hal ini dapat dilaksanakan oleh orang yang menemukan anak tersebut, maka sahlah anak tersebut sebagai anak kandungnya dan mempunyai akibat hukum keperdataan dalam bidang kewarisan, perwalian dan sebagainya. Menurut Ahmad Al-Barri, mengambil dan memelihara anak terlantar adalah wajib. Hal ini menjadi tanggung jawab masyarakat, atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai *fardhu kifayah*. Tetapi hukum ini dapat menjadi *fardhu 'ain*, misalnya seseorang menemukan anak terlantar ditempat yang sangat membahayakan.¹¹

Nasab dan Perwalian Anak Laqith

Pengertian nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan

¹⁰ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana Prenada Media 2008) 94.

¹¹ Chuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafiz Anshary A.Z., *Op.Cit.* 154.

atau menetapkan keturunan. Menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya *al-iqhul Islamiyyu wa Adillatuh*, *nasab* adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: *nasab*, *ridha'* (susuan), *hadhanah* (pemelihara-an), *walayah* (perwalian/ perlindungan) dan *nafkah*.

Pada dasarnya anak temu-an adalah merdeka baik laki-laki atau perempuan. Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwasanya keduanya menghukumi anak temuan adalah merdeka. Karena pada dasarnya dia itu merdeka dan termasuk Bani Adam. Karena manusia semua adalah anak cucu Adam a.s dan Hawa dan keduanya adalah merdeka, dan orang yang lahir dari orang merdeka adalah merdeka. Adapun terjadi perbudakan bagi yang menentang, maka wajib beramal dengan aslinya yaitu merdeka dan keadaan anak temuan adalah merdeka, sampai ada ketetapan sebaliknya yaitu bahwa dia budak.

Dalam hukum islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah;
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah

seorang betul anak sipulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasid*. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendiri mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu meng-akuinya.¹²

Fuqaha sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain atau tidak diketahui orang tuanya, *nasab* anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan sang anak diantara masyarakat dengan menisbahkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan *nasab*-nya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan, dan hak waris.

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajiban-nya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang

¹² Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Pustaka Bangsa 2008) 182.

bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sedangkan nafkah menjadi kewajiban *Baitmal* untuk membiayai hidupnya dan anak itu ditangan (diasuh) orang yang menemukannya.

Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak itu. Umar bin Khathab berkata bagi yang menemukan seorang anak (*al-mutalaqqith*): “kamu yang menjadi walinya, dan kewajiban kami menafkahnya.” Umar bin Khathab memberikan bagian nafkah anak itu dari apa yang dibutuhkannya, dan memberikan kepada walinya setiap bulan. Oleh karena itu, *fuqaha* menetapkan bahwa jika yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menurut hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak yang semula sebagai anak wajar (*natuurlijke kinderen*) menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian izin kawin, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama

orang tua yang mengakuinya, mewaris, dan sebagainya.

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya dengan makna, pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Dalam literatur *fiqih* klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum Islam anak temuan dapat di-*nasab*-kan kepada orang yang menemukan dengan jalan pengakuan. Dengan adanya pengakuan maka anak temuan

tersebut telah menjadi anak sah sebagaimana anaknya sendiri.

Islam Kontemporer I (Pustaka Firdaus 2002).

- b. Perwalian terhadap anak temuan perempuan tetap berada pada orang yang telah menemukan dan mengakuinya dan jika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka yang menjadi walinya adalah orang yang telah menemukan dan mengakuinya.

DAFTAR BACAAN

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1998).

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI-XXII* (Pustaka Panji Mas 1988).

Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Pustaka Bangsa 2008).

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar 1990).

Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1997).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13* (PT. Al-Ma'arif 1987).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Jilid XV: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera Hati 2004).

Yanggo, Chuzaimah T., dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., *Problematika Hukum*